



PENGAJUAN PENDANAAN IKLIM KALIMANTAN BARAT Berlanjut ke Tahap Pengembangan Proposal Proyek Secara Penuh

ARTIKEL LAINNYA

FORCLIME LAKSANAKAN *QUARTERLY MEETING* Berkolaborasi dengan PROPEAT

SUB POKJA GENDER BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Susun Rencana Kerja Tahun 2022

BERKOORDINASI DENGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH Siapkan Pelaksanaan Magang di FORCLIME

UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER PAPUA DAN FORCLIME BERKOORDINASI Siapkan Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2022

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA ADAKAN KOORDINASI Siapkan Pelaksanaan Program Prioritas Bersama FORCLIME di Tahun 2022

Editorial

Dengan senang hati saya menulis Editorial untuk Newsletter FORCLIME edisi bulan Juni 2022, yang menyoroti kemajuan persiapan proyek *Green Climate Fund* (GCF) di Kalimantan Barat. FORCLIME telah menerima lampu hijau dari semua lembaga terkait yang memiliki otoritas untuk mulai menyusun proposal proyek secara penuh. Setelah melalui proses panjang, yang sudah dimulai sejak tahun 2019, kami didekati oleh provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama mencoba mengakses pendanaan perubahan iklim internasional melalui GCF.

GIZ sebagai Entitas Terakreditasi *Green Climate Fund* memiliki mandat dan struktur manajemen untuk menyalurkan pendanaan iklim internasional ke tingkat lokal. Para pimpinan kami yang lebih tinggi dan *Green Climate Fund* telah menyetujui *concept note* yang disusun di Indonesia yang merupakan dasar untuk pengembangan proyek lebih lanjut. Langkah selanjutnya selama beberapa bulan ke depan adalah studi



kelayakan di mana implementasi nyata proyek akan dirancang dengan para pihak terkait sebagai dasar untuk proposal pendanaan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, *Green Climate Fund* dan Gubernur Kalimantan Barat untuk desain proyek.

Penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa pendanaan ini sejalan dengan strategi REDD+ Provinsi Kalimantan Barat dan pada akhirnya berkontribusi pada strategi NDC dan FoLU Net Sink 2030. Kami mencari penyelarasan dengan rencana pemerintah, namun juga mengundang inisiatif lain untuk mengoordinasikan atau mendanai kegiatan bersama.

Pada akhirnya, dukungan tersebut akan membantu Indonesia untuk berkontribusi secara signifikan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Barat, berdasarkan kemitraan jangka panjang antara FORCLIME dengan pemerintah provinsi.

Georg Buchholz
Direktur Program FORCLIME

Pengajuan Pendanaan Iklim Kalimantan Barat Berlanjut ke Tahap Pengembangan Proposal Proyek Secara Penuh

Jumtani, Advisor untuk Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Provinsi Kalimantan Barat telah menyatakan komitmen untuk mendukung upaya nasional dan internasional dalam penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan sejak tahun 2012. Wujud komitmen Kalimantan Barat terhadap pembangunan rendah emisi ini dituangkan dalam dokumen rencana strategis penurunan emisi (SRAP REDD+) dengan target hingga 60% sampai 2030 dari deforestasi dan degradasi. Rencana ini selaras dengan rencana pembangunan daerah yang mempunyai visi pembangunan penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Upaya yang dikembangkan diantaranya penyusunan kerangka kebijakan pelaksanaan program pembangunan rendah emisi, penguatan kelembagaan perubahan iklim, pengembangan jejaring multipihak, mendorong insentif dan mengakses sumber pembiayaan terkait iklim.

Tahun Pemantauan	Emisi Aktual	Emisi BAU Kalbar	Kinerja	Alokasi Emisi Provinsi	Kinerja	Alokasi Emisi Nasional	Kinerja
2012 - 2013	96,79	22,11	-74,68	8,84	-87,94	7,50	-89,29
2013 - 2014	11,87	22,11	10,24	8,84	-3,02	7,50	-4,37
2014 - 2015	14,92	22,11	7,19	8,84	-6,07	7,50	-7,42
2015 - 2016	65,12	22,11	-43,01	8,84	-56,27	7,50	-57,62
2016 - 2017	20,07	22,11	2,04	8,84	-11,23	7,50	-12,57
2017 - 2018	7,85	22,11	14,26	8,84	1,00	7,50	-0,35

*Catatan: angka dalam MtCO2eq
 Sumber: Factsheet Pokja REDD+ edisi Januari 2021

Laporan Kinerja penurunan emisi pada sektor kehutanan dan sektor berbasis lahan sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan, dilakukan penghitungan emisi pada periode 2013-2018. Monitoring kinerja penurunan emisi ini dievaluasi berdasarkan *baseline* yang telah ditetapkan dalam dokumen sinkronisasi FREL. Laporan ini menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan belum berbanding lurus dengan capaian target penurunan emisi yang ditetapkan sebesar 60% dimana hanya baru berhasil pada satu periode sepanjang enam periode pengukuran.

Diantara tantangan penyelenggaraan pembangunan rendah emisi dan implementasi rencana aksi penurunan emisi yang telah disusun adalah keterbatasan sumber pendanaan. Bersama GIZ sebagai lembaga akreditasi GCF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan



Sumber data: Socio-ekonomi: BPS deforestasi: data diambil dari Kementerian Kehutanan

concept note kepada NDA Indonesia pada tahun 2019 yang diterima dan lolos dalam seleksi NDA GCF Indonesia. Pengembangan *concept note* ini merupakan bagian dari implementasi strategi rencana aksi REDD+ Kalimantan Barat.

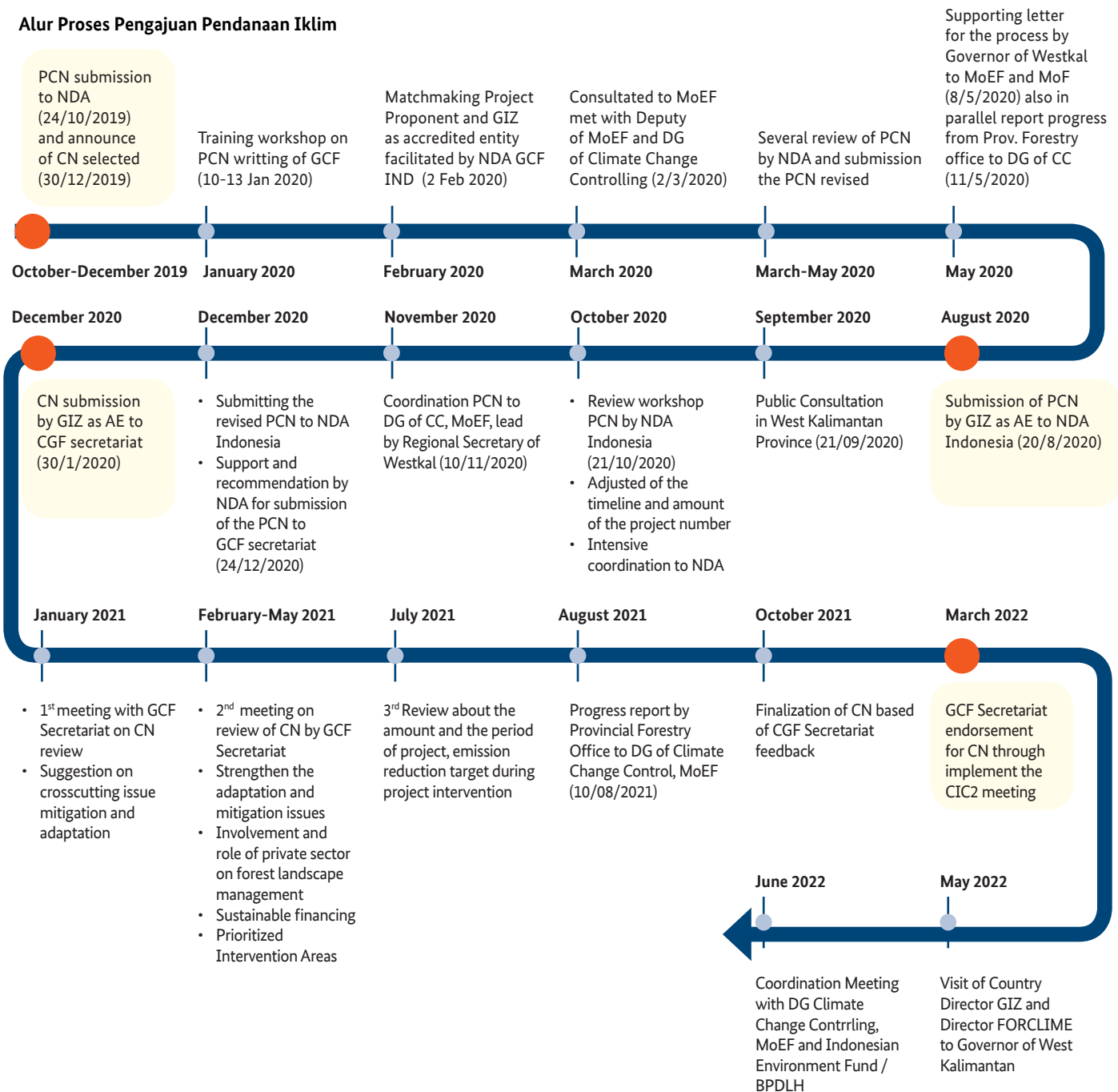
Pada tahun 2020, beberapa kegiatan dilaksanakan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para pihak baik di tingkat lokal dan nasional dengan tujuan menginformasikan rencana Provinsi Kalimantan Barat dan mengsinergikan serta mengharmonisasikan rencana yang disusun untuk aksi perubahan iklim yang dituangkan dalam *concept note*. Koordinasi dengan Ditjen PPI dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan dan memperkuat komitmen Kalimantan Barat dalam isu perubahan iklim dan sebagai wujud pencapaian komitmen Provinsi Kalimantan Barat untuk berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi nasional sebagai dalam NDC.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal selaku Sekretariat NDA Indonesia, diantaranya pelatihan penulisan *concept note*, perjodohan dengan *AE accredited entities* dimana dalam hal ini GIZ mendapat kepercayaan ditunjuk oleh Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga akreditasi. Selanjutnya, NDA melakukan peninjauan terhadap *concept note* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penulisan, terutama terkait substansi yang terhubung dengan isu dan kerangka nasional maupun global. Dalam *workshop* yang diselenggarakan oleh NDA pada akhir Oktober 2020 dilakukan peninjauan secara menyeluruh dan direkomendasikan untuk diajukan kepada GCF Sekretariat yang berkedudukan di Songdo, Korea Selatan.

Pada semester pertama 2021, dilakukan peninjauan terhadap *concept note* oleh Sekretariat *Green Climate Fund* terkait rencana program yang disusun, desain keberlanjutan maupun terhadap desain finansial proyek serta peran sektor swasta dalam mekanisme pendanaan berkelanjutan. Beberapa kali diskusi antara sekretariat GCF, GIZ dan Pemprov Kalimantan Barat dilakukan untuk penyempurnaan *concept note* dan penyesuaian dengan kerangka kerja GCF.



Alur Proses Pengajuan Pendanaan Iklim





Pertemuan bersama para pihak di tingkat lokal dilakukan untuk penguatan dan pendampingan terutama pada penyusunan regulasi dan kelembagaan lokal terkait mekanisme pelaporan kegiatan penurunan emisi, penguatan sistem informasi yang terhubung ke sistem nasional, revisi kelembagaan Pokja REDD+ dan penyelenggaraan beberapa pertemuan, seminar untuk memperkuat posisi Kalimantan Barat dalam isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim serta komitmen Provinsi Kalimantan Barat dalam kontribusi pencapaian FoLU Net Sink 2030.

Komunikasi dan koordinasi para pihak berjalan dengan baik, didukung komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dukungan kantor FORCLIME Jakarta serta tenaga ahli dari kantor pusat GIZ. Komunikasi para pihak lainnya juga dilakukan mulai dari level provinsi, nasional dan internasional untuk membangun kesepahaman dan sinergitas dalam penyusunan konsep note sesuai kerangka pendanaan Green Climate Fund.

Pada bulan Maret 2022 melalui Sidang CIC-2 (*Climate Investment Committee-2*) Sekretariat *Green Climate Fund* menyatakan menerima dan mendukung *concept note* Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berjudul: “Aksi Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lansekap melalui Pendekatan Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Barat”. Dengan demikian usulan tersebut dapat berlanjut dengan penyusunan proposal penuh pembiayaan proyek.

Pada bulan April 2022 diselenggarakan pertemuan PAC-2 (*Project Approval Committee*) yang dikoordinasikan oleh *Business Development Unit* (BDU) dengan peserta dari beberapa divisi untuk pengambilan keputusan keberlanjutan proyek diterima dan didukung oleh Sekretariat GCF tersebut. PAC-2 memutuskan bahwa proyek *Green Climate Fund* di Provinsi Kalimantan Barat yang sedang dikembangkan dapat dilanjutkan dan diberikan dukungan untuk pengembangan ke tahap pengembangan proposal pembiayaan secara penuh. Sebagai lembaga akreditasi, setiap tahun GIZ mengalokasikan sumber daya



bagi pengembangan satu proyek *Green Climate Fund* di seluruh dunia dan untuk tahun 2022 dialokasikan untuk Indonesia melalui proyek GCF di Provinsi Kalimantan Barat.

Komunikasi antara GIZ sebagai Lembaga akreditasi GCF dan Provinsi Kalimantan Barat dilanjutkan dengan kunjungan *Country Director* GIZ Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, yang didampingi Direktur FORCLIME kepada Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 17 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji, SH, M.Hum., didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta ahli ekonomi dan ahli perubahan iklim. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai rencana pengembangan proyek GCF, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk bertukar informasi dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun. Gubernur juga menyampaikan prioritas pembangunan Kalimantan Barat terkait tata kelola sumber daya alam kehutanan dan sektor berbasis lahan.

Penerbitan SK Menteri Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim* semakin memperkuat langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melanjutkan komunikasi dalam rangka membangun kesepahaman

berkenaan pembangunan rendah emisi. Proyek yang dikembangkan melalui pendanaan iklim dari *Green Climate Fund* ini merupakan perwujudan komitmen dan upaya Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pencapaian target target FoLU Net Sink 2030 tersebut.

Dalam audiensi pada awal Juni 2022 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim mengapresiasi dan mendukung upaya Pemprov Kalimantan Barat dan GIZ untuk pengembangan program dan pencapaiannya hingga ke tahap selanjutnya. Disampaikan juga bahwa perlu penekanan pada rencana pengembangan proyek yang bersinergi dan berkontribusi pada pencapaian target nasional untuk FoLU Net 2030.

Selain itu, juga dilakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mendapatkan informasi dan masukan mengenai desain aliran pendanaan proyek dan mekanisme penyalurannya, serta peran para pihak, baik di tingkat nasional maupun provinsi dalam tahap implementasi.

Pada saat ini, kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah persiapan penyusunan studi kelayakan yang dilanjutkan dengan penyusunan proposal penuh pembiayaan proyek yang akan diajukan kepada *Green Climate Fund*.

Artikel lainnya

FORCLIME Laksanakan Quarterly Meeting Berkolaborasi dengan PROPEAT

FORCLIME secara rutin melaksanakan *Quarterly Meeting* sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mitra kerja FORCLIME. Pada kuartal kedua tahun 2022, FORCLIME melaksanakan *Quarterly Meeting* di Samarinda tanggal 7-9 Juni 2022.

Quarterly Meeting hari pertama dibuka dengan presentasi dari Bapak Georg Buchholz, Program Direktur FORCLIME, terkait update kebijakan yang berkembang di BMZ, GIZ, dan terkait kegiatan FORCLIME, dan dilanjutkan dengan topik Monitoring dan Evaluasi untuk refleksi keberjalanan FORCLIME, melihat capaian, dan mendiskusikan strategi pelaksanaan program ke depan.

Selanjutnya, Ibu Nur Hygiawati Rahayu selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan arahan untuk program FORCLIME dan menjelaskan isu-isu perencanaan kehutanan di tingkat nasional, terutama terkait Bioekonomi. FORCLIME akan mendukung Bappenas melakukan kajian Bioekonomi, yang diharapkan dapat berkontribusi untuk Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Di siang hari, pembahasan berfokus pada isu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perhutanan sosial di Papua dan Papua Barat. Pada sesi ini, secara daring hadir perwakilan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Jayapura, BPKH Wilayah XVII



Manokwari, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Jayapura, dan BPHP Wilayah XVI Manokwari. Perwakilan dari BPKH dan BPHP menyampaikan tantangan dan potensi di kawasan kerja masing-masing, dan menyampaikan masukan untuk FORCLIME terkait potensi kolaborasi bersama.

Di hari kedua, kegiatan utama *Quarterly Meeting* adalah bertukar pengetahuan dan pembelajaran dengan proyek GIZ terkait rehabilitasi gambut di Kalimantan, yaitu *Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)*. Metode yang digunakan selama pertukaran pengetahuan adalah *world cafe method*. Terdapat enam *booth* yang membahas isu-isu spesifik dari FORCLIME dan PROPEAT, dengan 2 orang penanggung jawab (PJ) di masing-masing *booth*. Peserta rapat selain PJ diwajibkan untuk berkeliling mendatangi semua *booth* untuk mendengarkan penjelasan suatu isu dan bertukar pikiran.

Agenda *Quarterly Meeting* hari terakhir adalah melakukan kunjungan ke salah satu kawasan ekowisata milik PT Inhutani I, yaitu Wanawisata Bukit Bangkirai.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Pokja Gender Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Susun Rencana Kerja Tahun 2022

Sejak beberapa tahun lalu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai komitmen kuat untuk mengembangkan program pengarusutamaan gender (PUG). Komitmen tersebut diimplementasikan melalui kegiatan bersama dengan FORCLIME sejak tahun 2018.

Dalam rangka memperkuat upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sub Pokja Gender bersama FORCLIME melakukan

pertemuan membahas rencana kerja tahun 2022. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2022 secara daring dan dihadiri 52 peserta dari berbagai satuan kerja lingkup BP2SDM, FORCLIME dan Pokja Gender KLHK.

Beberapa rencana yang disepakati akan diimplementasikan di tahun 2022 antara lain:

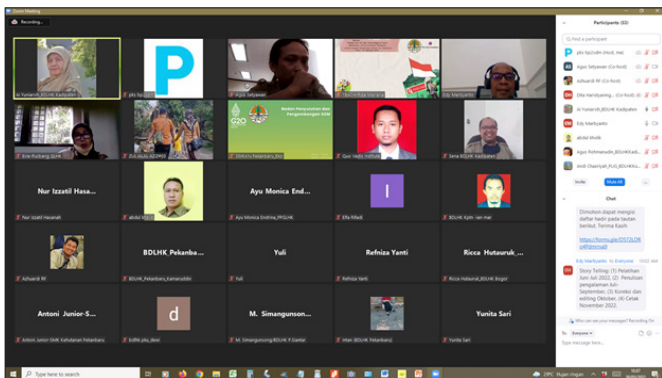
1. Pengesahan Kriteria dan Indikator Lembaga Diklat Responsif Gender.
2. Penyusunan *Gender Analysis Pathways* dan *Gender Budget Statement* untuk Rencana Kerja tahun 2023 bagi Satuan Kerja Lingkup BP2SDM.
3. Penyusunan Buku *Lessons Learned* Pengalaman Staf BP2SDM (Penyuluh, Widyaiswara, dll) terkait pengarusutamaan gender menggunakan metoda *storytelling*.
4. Penyusunan Buku Saku Pengarusutamaan Gender bagi Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup.
5. Penyusunan Kriteria dan Indikator Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang Responsif Gender.
6. Pembaharuan Surat Keputusan Tim Sub Pokja Gender BP2SDM.

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan program PUG di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya BP2SDM akan semakin solid dan melembaga.

“Kerja sama Sub Pokja Gender BP2SDM dengan FORCLIME sudah berjalan lama. Kami berharap dukungan FORCLIME tetap terus berjalan agar kegiatan PUG di BP2SDM makin solid”, kata bapak Agus Setiawan (Sub Pokja Gender BP2SDM).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
2. Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik



Berkoordinasi dengan Universitas Cenderawasih siapkan pelaksanaan magang di FORCLIME

Dalam rangka koordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan magang dan pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik, Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih dan FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada 23 Mei 2022 di Ruang Pertemuan Fakultas MIPA, Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, Papua. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dekan Fakultas MIPA, Dr. Dirk Runtoboi, M.Kes., dan juga dihadiri Direktur Program FORCLIME.

Pertemuan diawali dengan presentasi dua mahasiswa Fakultas MIPA, yaitu Sonia Kwano dan Mia Esti Asmuruf yang mengikuti program magang di FORCLIME selama enam bulan, yang setara dengan 20 satuan kredit semester (SKS) untuk mata kuliah yang berhubungan dengan materi magang di FORCLIME.



Dalam presentasi dijelaskan materi-materi pembelajaran yang didapatkan selama mengikuti program magang, seperti terlibat dalam proses *Free, Prior Informed Consent* (FPIC); Pemetaan partisipatif; Proses perencanaan hutan melalui penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) di kawasan konservasi; Identifikasi kampung yang akan didukung FORCLIME; Proses administrasi yang mengacu pada standar GIZ. Selain itu, Sonia dan Mia juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan teknik-teknik pemetaan dengan supervisi dari Advisor bidang GIS.

“Sangat bangga karena lewat program magang di FORCLIME, mahasiswa meningkat soft skill-nya dan mendapatkan pengalaman lain yang tidak bisa diperoleh lewat pembelajaran di kampus”, kata Dr. Dirk Runtoboi, M.Kes, Dekan Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih.

Sementara itu Octalia Togibasa, PhD., MSi. Pembantu Dekan 1 Fak. MIPA, dalam diskusi menyampaikan bahwa program magang seperti ini perlu terus dilaksanakan karena sangat mendukung kampus,

terutama dalam mengembangkan model pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Direktur program FORCLIME, George Buchholz menyampaikan bahwa FORCLIME akan terus mendukung program magang dan juga program KKN tematik. Dan pada tahun 2022 ini siap untuk menjadi tempat magang bagi tiga mahasiswa dan satu kelompok mahasiswa yang akan melaksanakan KKN tematik dengan fokus pelaksanaan kegiatan di kampung-kampung dukungan FORCLIME. Program magang dan KKN tematik akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022, sehingga proses persiapan akan segera dimulai.

Selain dengan Universitas Cenderawasih, program magang FORCLIME juga akan dilaksanakan bersama Universitas Ottow Geissler Papua dan Universitas Musamus Merauke.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodora F. Resubun**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Universitas Ottow Geissler Papua dan FORCLIME Berkoordinasi Siapkan Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2022

Dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program prioritas tahun 2022, Universitas Ottow Geissler dan FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 24 Mei 2022 di Ruang pertemuan Rektorat Universitas Ottow Geissler, Jayapura, Papua. Pertemuan dibuka oleh Rektor Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP), Dr Jerry Sawai, M.Si., dan membahas perkembangan program yang telah diinisiasi bersama, antara lain:

- Pembangunan laboratorium GIS, sebagai *center of excellent* UOGP. Ruang yang akan digunakan sebagai laboratorium *center of excellent* dan kelembagaan yang melibatkan seluruh fakultas di UOGP telah disusun.
- Hutan Pendidikan Nyei Toro: struktur kelembagaan pengelolaan hutan pendidikan yang melibatkan UOGP, Pemda dan masyarakat adat Necheibe sedang disiapkan.
- FORCLIME akan menerima dua mahasiswa dalam program magang tahun 2022 melalui proses seleksi. Program magang ini akan terintegrasi dengan metoda Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM).
- UOGP telah mempersiapkan organisasi himpunan mahasiswa jurusan (Sylva UOGP) menjadi anggota International Forestry Student Association (IFSA). Semua persyaratan telah dilengkapi dan diserahkan untuk proses registrasi.



“Program FORCLIME sangat strategis dan mendukung pengembangan program di Universitas Ottow Geissler Papua melalui peningkatan kapasitas,”

kata Wakil Rektor I, George M. Satya, M.Sc., PhD.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodora F. Resubun**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua adakan koordinasi siapkan pelaksanaan program prioritas bersama FORCLIME di tahun 2022

Dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program prioritas bersama FORCLIME, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua (Dinas KLH) mengadakan pertemuan koordinasi dengan FORCLIME pada 22 Mei 2022 di ruang pertemuan kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) XXI di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas KLH, Dr. Estiko Tri Wiradyo, SH. M.Si., dihadiri pula oleh perwakilan dari KPHP XXI Mamberamo-Sarmi dan KPHP XXIII Sarmi.

Dalam arahnya, Dr. Estiko menjelaskan bahwa selama ini dukungan terhadap KPH lebih diprioritaskan kepada KPH Model seperti KPH Biak Numfor. Dengan adanya FORCLIME, dukungan untuk memperkuat KPH juga dilakukan di KPHP XXI dan KPHP XXIII. Di kedua KPHP tersebut, FORCLIME akan mendukung dari sisi teknis untuk perbaikan tata kelola, selain itu, juga mendukung pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kedua KPHP tersebut diharapkan kedepannya akan menjadi contoh di wilayah utara Papua.

Dalam paparannya, Plt Kepala KPHP unit XXIII Sarmi, Henoch Kende, menjelaskan bahwa selain wilayah terestrial, wilayah KPHP XXIII juga meliputi wilayah kerja di lima pulau dengan potensi ekowisata sebagai spot pemancingan dan lokasi bertelur penyu. Potensi lain adalah pengembangan ekowisata untuk air terjun dan juga pemanfaatan HHBK lainnya seperti pemanfaatan daun gaharu untuk membuat teh gaharu, madu Trigona. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan yang cukup tinggi di wilayah ini adalah damar, merbau dan juga pemanfaatan taman satwa liar (TSL) seperti burung yang memiliki potensi cukup tinggi namun perlu dilakukan pendataan lebih lanjut. KPHP XXIII juga direncanakan sebagai sumber pembibitan gaharu.

Kepala seksi perencanaan KPHP Unit XXI lintas Mamberamo Sarmi, Debora Sawen, menjelaskan bahwa di KPHP XXI terdapat potensi pengembangan HHBK seperti minyak buah merah dan olahan kue kering sagu. Selain itu terdapat potensi ekowisata seperti air terjun, pemandian air panas namun masih perlu dikembangkan untuk menjadi obyek wisata dengan melakukan publikasi dan juga design ekowisata.



Dukungan FORCLIME yang akan dilaksanakan antara lain:

- Bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP).
- Kajian biogeofisik kawasan yang akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan dana FORCLIME.
- Pelatihan kepemimpinan bagi tingkat manajer di KPH dan Dinas KLH.
- Pelatihan digital marketing untuk memperkuat Gallery Kreatif Kehutanan sehingga dapat mendukung penjualan hasil hutan bukan kayu dari KPHP XXI dan KPHP XXIII yang selama ini dipasarkan lewat Galeri Kreatif Kehutanan.
- Penyusunan masterplan pengembangan ekowisata di wilayah Sarmi.

***“Dukungan FORCLIME terutama dalam kajian keanekaragaman hayati dan potensi KPHP XXIII akan sangat bermanfaat dalam proses perencanaan di KPHP XXIII, sehingga penyusunan dokumen RPHJP dilakukan berdasarkan potensi yang ada”,
kata Henoch Kende, Plt Kepala KPHP XXIII.***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodora F. Resubun**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de